

PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ROMEAN KECAMATAN FORDATA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Magdalena Elath¹, Rendy Oratmangun², Krispina Fenanlampir³
elathlen25@gmail.com¹, oratmangunr@gmail.com²
Universitas Lelemuku Saumlaki

ABSTRAK

Negara Indonesia menerapkan asas desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam desentralisasi ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini membahas pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Romean, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD memberikan dampak signifikan pada pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa dampak negatif, seperti potensi ketergantungan masyarakat pada ADD, distribusi dana yang tidak merata, dan masalah pengelolaan yang kurang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengelolaan ADD yang lebih transparan, partisipatif, dan berfokus pada kemandirian masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas ADD sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Romean.

ABSTRACT

Indonesia adopts a decentralization system, allowing regional autonomy in governance. One key aspect of this decentralization is the Village Fund Allocation (ADD), aimed at supporting development at the village level and empowering local communities. This study examines the impact of ADD on community empowerment in Romean Village, Fordata Subdistrict, Tanimbar Islands Regency. The findings reveal that ADD significantly contributes to infrastructure development, strengthening MSMEs, and improving access to essential services such as healthcare and education. However, the study also identifies negative effects, including potential dependency on ADD, unequal fund distribution, and ineffective management issues. To address these challenges, a more transparent, participatory, and community-oriented management of ADD is essential. This study provides recommendations to enhance ADD's effectiveness as a sustainable community empowerment instrument.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Empowerment, Romean Village.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terdiri atas beberapa daerah, wilayah/provinsi, disetiap wilayah/provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya setiap kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), menyatakan bahwa,

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, karena desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, oleh karena itu akan sangat logis apabila ada pemberdayaan masyarakat di desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal. Salah satu sumber penerimaan alokasi dana desa merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya anggaran alokasi dana desa tersebut yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa melalui pendanaan yang diberikan secara langsung kepada pemerintah desa. Program ini telah memberikan dampak signifikan pada berbagai daerah di Indonesia untuk memberdayakan serta meningkatkan kemakmuran terhadap masyarakat.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, pemerintah desa setempat mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, yang membantu memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, mengembangkan dan menegakkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) pada desa setempat. Dengan adanya akses ke pendanaan ini, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan kapasitas mereka, serta membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Melalui Alokasi Dana Desa, masyarakat desa dapat merasakan peningkatan kesejahteraan mereka secara langsung. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana desa dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat desa. Sementara itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dapat membuka peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memperoleh pekerjaan yang lebih maksimal serta berpenghasilan lebih tinggi.

Selain itu, ADD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Dengan mendukung serta mengembangkan UMKM pada desa setempat, dana tersebut membantu masyarakat desa dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal ini berpotensi menciptakan pekerjaan yang baru untuk menaikkan taraf hidup konsumen rumah tangga, dengan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam jangka panjang, peningkatan ekonomi lokal ini juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara keseluruhan, ADD memiliki dampak yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui akses terhadap

pendanaan yang sebelumnya tidak tersedia. Dengan bantuan dana desa, masyarakat desa memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang juga berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan di suatu daerah yaitu melalui potensi pada suatu wilayah.

Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan yang didanai oleh ADD. Melalui mekanisme partisipatif ini, masyarakat desa dapat berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, mengawasi penggunaan dana desa, dan memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Selanjutnya, ADD juga berkontribusi pada penguatan kapasitas pemerintah desa. Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Melalui proses ini, pemerintah desa dapat belajar dan berkembang dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Penguatan kapasitas ini berdampak positif tidak hanya pada pengelolaan dana desa, tetapi juga pada kapasitas pemerintah desa dalam penyelesaian fenomena ekonomi yang terjadi pada sebuah desa.

Pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat tidak dapat disangkal. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengambil kendali atas pembangunan lokal mereka sendiri, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui pendanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik, Alokasi Dana Desa dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong taraf hidup masyarakat.

Meskipun program pemberdayaan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Romean di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui sumber penganggaran Anggaran Dana Desa (ADD) memiliki dampak positif yang signifikan, namun tidak terlepas dari adanya beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak negatif yang mungkin muncul adalah terkait dengan ketergantungan masyarakat terhadap ADD sebagai sumber pendanaan utama.

Ketergantungan masyarakat terhadap ADD dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan inisiatif untuk mencari sumber pendapatan lain di luar program-program yang didukung oleh ADD. Hal ini dapat menghambat perkembangan usaha mandiri dan kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang beragam. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada ADD juga dapat mengurangi tanggung jawab individu dan mendorong sikap pasif dalam mengelola sumber daya dan pembangunan desa secara mandiri.

Selain itu, terdapat potensi munculnya masalah terkait dengan distribusi dan penggunaan dana ADD secara tidak efisien atau tidak tepat sasaran. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pemantauan yang memadai dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh ADD. Jika tidak ada mekanisme kontrol yang kuat, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana atau pemilihan prioritas program yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak negatif lainnya adalah adanya ketimpangan atau kesenjangan dalam pemberdayaan antara kelompok masyarakat. Program-program pemberdayaan yang didanai oleh ADD mungkin tidak merata dalam memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok yang memiliki akses atau pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan desa mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang kurang terwakili atau tidak memiliki akses yang memadai.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Romean. Diperlukan perencanaan

yang matang, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana ADD. Selain itu, program-program pemberdayaan haruslah berfokus pada pengembangan kemandirian masyarakat, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kapasitas dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Berdasarkan alasan di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian pembuktian atas fenomena yang terjadi itu maka judul yang ingin diteliti yakni “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Romean Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain evaluasi untuk menilai pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Romean, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data numerik yang diolah dengan metode statistik guna menguji hipotesis secara akurat dan andal. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan variabel yang diteliti.

Lokasi penelitian adalah Desa Romean, yang dipilih karena relevansi konteksnya dalam mengkaji pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat. Populasi penelitian berjumlah 32 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Skala Likert digunakan untuk mengukur variabel pemberdayaan masyarakat, memberikan responden lima pilihan tingkat persetujuan dari "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju."

Instrumen penelitian berupa kuesioner dikembangkan dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas. Validitas diuji untuk memastikan instrumen mengukur variabel yang diinginkan, sementara reliabilitas diuji dengan koefisien Cronbach's Alpha, yang memastikan konsistensi hasil pengukuran. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana, didukung dengan uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis untuk mengukur hubungan antara ADD dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Romean, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hasil analisis regresi linier sederhana memperlihatkan adanya hubungan positif antara ADD sebagai variabel independen dan pemberdayaan masyarakat sebagai variabel dependen, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi yang memenuhi kriteria statistik. Semakin besar ADD yang dialokasikan, semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat, mencakup kemampuan, kepercayaan, dan tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya.

Dari karakteristik demografi, mayoritas responden adalah laki-laki yang berprofesi sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa ADD sangat relevan untuk mendukung sektor agraris yang menjadi mata pencaharian utama di desa tersebut. Pendidikan responden mayoritas berada pada tingkat rendah, yakni lulusan SD, sehingga menunjukkan bahwa ADD telah menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Manfaat ADD terlihat dari peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas publik, yang secara langsung meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.

Tingkat kepuasan responden terhadap pengelolaan ADD cukup tinggi, terutama dalam aspek transparansi anggaran dan keterbukaan pengelola dalam melibatkan masyarakat. Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Beberapa masyarakat merasa tidak sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan program yang didanai oleh ADD. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan partisipasi warga dalam proses perencanaan untuk memastikan program lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

Program ADD juga dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain membantu pengembangan bisnis lokal, ADD turut memberikan dampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran di desa melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor agraris dan UMKM. Keberhasilan ini mendukung penguatan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Pada aspek sosial, ADD membantu memperkuat solidaritas komunitas desa melalui kegiatan gotong royong dan kolaborasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Responden menyatakan bahwa ADD mendukung peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, seperti renovasi sekolah dan pengadaan fasilitas kesehatan dasar. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi ADD, termasuk potensi penyalahgunaan dana dan kurangnya pengawasan dalam distribusi anggaran, yang dapat mengurangi efektivitas program.

Dampak positif ADD juga terlihat dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan ini. Namun, beberapa responden mengungkapkan bahwa program yang didanai ADD tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis data.

Secara keseluruhan, ADD dinilai sebagai alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, ADD mampu meningkatkan inisiatif masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ADD memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, diperlukan peningkatan pengawasan, transparansi, dan pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan program ADD. Temuan ini memberikan rekomendasi penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

Alokasi dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa guna menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Hasil persepsi responden atas variabel alokasi dana desa indikator akuntabel memiliki rata-rata terendah, maka saran yang bisa diberikan adalah pihak pemerintah harus memperhatikan tahapan Pengelolaan alokasi dana desa dan melibatkan semua unsur-unsur masyarakat dan Pengelolaan alokasi dana harus disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat serta pengelolaan ADD harus melibatkan

- pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi ADD).
2. Hasil persepsi responden atas variabel pemberdayaan masyarakat indikator kepercayaan memiliki rata-rata terendah, maka saran yang bisa diberikan adalah pihak pemerintah harus memperhatikan informasi yang diberikan mengenai alokasi dana ditanggapi dengan serius oleh masyarakat serta pengelola alokasi dana desa lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Achmad Fathony, M. I. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 41-57.
- Anwas, Oos, M 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Dura J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Jikebe*. Vol. 10, No. 02
- Fitriyanti, 2020. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nanga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur.
- Kede, Elizabeth Eko Raja, 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.8 No.4.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabet
- Rossi, P. H. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach*. Sege Publications, (7th ed.).
- Sulfemi, A. d. (2017). *Pemberdayaan Individu Melalui Konsep Link And . Match dalam Perspektif Pendidikan Islam*. In *Prosiding Seminar Nasional, STKIP Muhammadiyah Bogor*.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*. Kandari: Universitas Halu Oleo.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Merhods*. Sage Publications, (5th ed.).
- Octaviani Pratiwi, 2021. Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa di desa bontoala kecamatan pallangga kabupaten gowa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11. Desa. 20 September 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 24 Juli 2007. 23 Mei 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310. Jakarta
- Awang, San Afri, dkk. 1996. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bappenas
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.